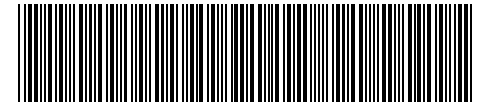




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408874/2024**



DS:9492-0197-6937-6049

Revisi ke 05

Tanggal : 10 Juli 2024

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
 3. Provinsi : (22) BALI
 4. Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
- Sebesar : Rp. 1.057.616.000 (SATU MILIAR LIMA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	1.057.616.000
Rp.	1.057.616.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 1.057.616.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 1.057.616.000

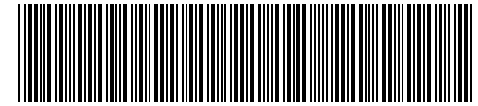
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9492-0197-6937-6049

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.057.616.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	1.057.616.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 3. 01	Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan dan Bersertifikat	
	: 4. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 5. 01	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kualitas dan Kuantitasnya	
	: 6. 01	Persentase Klien Usia Produktif yang Bekerja Melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Diluar Pokmas yang Berkekuatan Hukum Tetap	
	: 7. 01	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	
	: 8. 01	Persentase Narapidana yang Memperoleh Predikat Baik pada Variabel Pembinaan Kepribadian	
	: 9. 01	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai Standar	
	: 10. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 11. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 12. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 13. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 14. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 15. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	
	: 16. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 17. 02	Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Integrasi	
	: 18. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 19. 02	Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Dikeluarkan berdasarkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	
	: 20. 02	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	
	: 21. 02	Persentase Menurunnya Anak yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	
	: 22. 02	Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9492-0197-6937-6049

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 23. 02 Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- 24. 02 Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
- 25. 02 Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Kepribadian
- 26. 02 Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
- 27. 02 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap
- 28. 02 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
- 29. 02 Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
- 30. 02 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
- 31. 03 Persentase Anak Binaan yang Memperoleh Hak Pengasuhan sesuai Standar
- 32. 03 Persentase Kepatuhan dan Kisiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban
- 33. 03 Persentase Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial
- 34. 03 Persentase Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi
- 35. 03 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
- 36. 03 Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal
- 37. 03 Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
- 38. 03 Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
- 39. 03 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
- 40. 03 Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
- 41. 03 Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
- 42. 03 persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
- 43. 04 Persentase Anak Binaan yang Mengikuti Pendidikan Formal dan Non Formal
- 44. 04 Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
- 45. 04 Persentase Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9492-0197-6937-6049

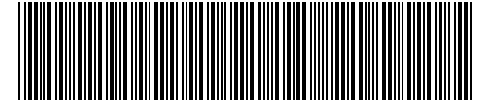
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : I A. 3

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

46. 04	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara Tuntas
47. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
48. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani
49. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
50. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
51. 05	Persentase Anak Binaan yang Mendapat Hak Remisi
52. 05	Persentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi
53. 05	Persentase Tahanan/ Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar
54. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
55. 05	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
56. 06	Persentase Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Pengentasan Anak
57. 06	Persentase Narapidana yang Bekerja
58. 06	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sesuai Standar
59. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
60. 06	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
61. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
62. 07	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang Mendapatkan Penanganan HIV-AIDS dan TB
63. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
64. 08	Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat
65. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
66. 09	Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA
67. 10	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pasca Akreditasi
68. 11	Tingkat kepatuhan RS Umum Pengayoman terhadap Clinical Pathway (%)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9492-0197-6937-6049

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : I A. 4

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

69. 12	Jumlah Pasien Umum yang Dilayani
70. 13	Bed Occupation Ratio (BOR) RSUD Pengayoman
71. 14	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan RSUD Pengayoman
72. 15	Jumlah PNBPN RSUD Pengayoman

Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	60,00	orang	207.257.000	
Rincian Output	:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	60,00	orang	207.257.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	14,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	658.559.000	
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasarakatan	14,00	Unit Kerja	658.559.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	191.800.000	
Rincian Output	:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12,00	operasi	191.800.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

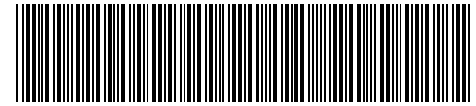
ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024

I B. SUMBER DANA



DS:9492-0197-6937-6049

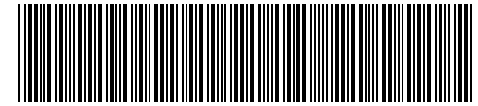
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	1.057.616.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	1.057.616.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9492-0197-6937-6049

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
408874	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	-	1.057.616	-	-	-	1.057.616		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.057.616	-	-	-	1.057.616		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	1.057.616	-	-	-	1.057.616		
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	207.257	-	-	-	207.257	22 . 51	
01	RM	-	207.257	-	-	-	207.257	037	
5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	658.559	-	-	-	658.559	22 . 51	
01	RM	-	658.559	-	-	-	658.559	037	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	191.800	-	-	-	191.800	22 . 51	
01	RM	-	191.800	-	-	-	191.800	037	
JUMLAH		-	1.057.616	-	-	-	1.057.616		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9492-0197-6937-6049

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408874) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408874	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	97.065	125.587	82.470	45.086	232.012	69.600	101.584	70.000	75.000	75.500	83.711	1.057.616
		BELANJA BARANG	0	97.065	125.587	82.470	45.086	232.012	69.600	101.584	70.000	75.000	75.500	83.711	1.057.616
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	0	97.065	125.587	82.470	45.086	232.012	69.600	101.584	70.000	75.000	75.500	83.711	1.057.616
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	97.065	125.587	82.470	45.086	232.012	69.600	101.584	70.000	75.000	75.500	83.711	1.057.616

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
IV A. B L O K I R**



DS:9492-0197-6937-6049

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408874] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408874/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:9492-0197-6937-6049

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408874] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NIP. 67090332